



PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN EKONOMI : FENOMENA KONTRADIKTIF DI KABUPATEN-KABUPATEN BERBASIS PESISIR

Mochamad Ridwan • Vevita Yolanda • Waldi Noviyarsah

Abstract. *The decision to make a regency became the center of economic growth for the surrounding districts has given rise to the phenomenon of inequality, especially in the economic field. This study aims to determine the economic growth centers of 6 coastal-based districts in the Bengkulu province and revealed the cases of economic inequality phenomena that occur between them. The data used is secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS). The analytical method used is the scalogram method, supported by the descriptive analysis method. The results showed that the two regencies identified as the centers of economic growth, namely (1) Muko-muko Regency, in a zone I (consisting of Muko-muko, Bengkulu Utara, and Bengkulu Tengah Regencies) and (2) Bengkulu Selatan Regency, in a zone II (consisting of Bengkulu Selatan, Seluma, and Kaur Regencies). Other results show that there is a very crucial anomaly/contradictory phenomenon, namely the two districts that were selected as centers of economic growth, the fact both have different levels of economic inequality, one higher and the other lower than the surrounding districts.*

Keywords: *Economic Growth Center, Economic Inequality, Coastal*

©2022 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah (antar kabupaten) adalah belum terbuktinya kemampuan daerah/kabupaten yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadi pemacu kemajuan khususnya bidang ekonomi bagi kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Seperti halnya kasus yang terjadi di Provinsi Bengkulu, di mana masih banyak daerah/kabupaten yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi cukup tinggi. Dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di wilayah Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu menduduki rangking paling tinggi dilihat dari rerata ketimpangan ekonomi, kendati perbedaannya tidak jauh berbeda (lihat Tabel 1). Hasil penelitian Fitrawaty (2020) mengindikasikan bahwa tingkatan fenomena ketimpangan ekonomi di Indonesia memperlihatkan besaran tingkatan yang relatif tidak jauh berbeda antara provinsi satu dengan provinsi lainnya. Secara empiris, ketimpangan ekonomi sangat erat kaitannya dengan peranan dari daerah (kabupaten) yang mampu

Mochamad Ridwan (✉)

Universitas Bengkulu

Email : mridwan@unib.ac.id

Vevita Yolanda

Universitas Bengkulu

Email : Veritayolanda@gmail.com

Waldi Noviyarsah

Universitas Bengkulu

Email : waldi@unib.ac.id

dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah atau kabupaten-kabupaten di sekitarnya sebagai kabupaten pemekarannya. Pusat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, substansinya lebih ditekankan pada kepemilikan fasilitas (ekonomi, sosial, dan lain-lain) dan tingkat daya saing sektor pertaniannya di antara kabupaten-kabupaten lainnya (Putra et al., 2017; Simangunsong & Kuang-Hui, 2018).

Tabel 1. Ketimpangan Ekonomi di Wilayah Pulau. Sumatera Dilihat dari Indeks Gini (Tahun 2015 s./d. 2020)

Wilayah (Provinsi)	Indeks Gini 10 Provinsi di Pulau Sumatera						Rerata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aceh	0,33	0,33	0,29	0,25	0,20	0,23	0,326
Sumatera Utara	0,36	0,19	0,15	0,18	0,20	0,16	0,321
Sumatera Barat	0,42	0,31	0,18	0,21	0,10	0,05	0,321
Riau	0,64	0,47	0,25	0,27	0,30	0,29	0,337
Jambi	0,61	0,49	0,35	0,34	0,20	0,2	0,337
Sumatera Selatan	0,60	0,48	0,61	0,58	0,30	0,39	0,349
Bengkulu	0,76	0,57	0,51	0,62	0,40	0,34	0,353
Lampung	0,76	0,64	0,34	0,46	0,30	0,27	0,346
Bangka	0,83	0,75	0,82	0,81	0,70	0,62	0,276
Kepulauan Riau	0,64	0,54	0,34	0,30	0,40	0,39	0,344

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia (2021).

Tabel 1 menunjukkan rerata tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini) tertinggi di Pulau Sumatera, terjadi di Provinsi Bengkulu. Hampir semua provinsi mempunyai kecenderungan (*trend*) tingkat ketimpangan yang menurun dari waktu ke waktu. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Pulau Sumatera (ditunjukkan oleh perkembangan angka Indeks Gini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020), secara rerata menunjukkan angka di atas 0,3 dan angka ini masih dalam kategori rendah. Kecenderungan yang menurun ini juga terjadi pada setiap kabupaten dan kota berbasis pesisir yang ada di Provinsi Bengkulu (6 kabupaten pesisir) (diperlihatkan oleh Tabel 2).



Tabel 2. Indeks Gini 6 Kabupaten Berbasis Pesisir di Provinsi Bengkulu (2015-2020)

Wilayah (Kabupaten)	Indeks Gini 6 Kabupaten di Provinsi Bengkulu						Trend
	Berbasis Pesisir						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Mukomuko	0,32	0,30	0,31	0,32	0,29	0,25	Menurun
Bengkulu Utara	0,35	0,31	0,31	0,35	0,30	0,28	Menurun
Bengkulu Tengah	0,37	0,30	0,28	0,29	0,22	0,22	Menurun
Seluma	0,35	0,32	0,33	0,31	0,30	0,29	Menurun
Bengkulu Selatan	0,39	0,34	0,37	0,36	0,32	0,31	Menurun
Kaur	0,38	0,33	0,32	0,31	0,29	0,22	Menurun

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bengkulu (2021).

Dari Tabel 2 terlihat bahwa Kabupaten Muko-muko yang kebetulan berstatus sebagai kabupaten induk, ternyata angka indeks ketimpangan ekonominya sedikit lebih rendah dari dua kabupaten pemekarannya yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan (sebagai kabupaten induk), di mana tingkat ketimpangan ekonominya sedikit lebih tinggi dari dua kabupaten pemekarannya yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Secara implisit, kedua kabupaten induk tersebut dapat dikatakan belum mampu berperan banyak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tanpak di sini ada satu permasalahan yang bersifat “bottle-neck” atau anomalistik yang seharusnya diungkap secara mendalam dan menyeluruh. Kurniawan & Huda (2020) menekankan bahwa ketimpangan ekonomi (ketimpangan distribusi pendapatan) mempunyai keterkaitan yang terbalik dengan PDRB perkapita. Suatu daerah yang mempunyai pendapatan perkapita yang cenderung meningkat, kondisi ketimpangannya akan cenderung menurun. Ditunjukkan oleh hasil studi Khrismaningrum (2020) bahwa di daerah berbasis pesisir, tingkat ketimpangan ekonominya relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah tidak berbasis.

Terjadinya ketimpangan ekonomi senantiasa terkait dengan peran atau fungsi dari kabupaten yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terhadap kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yang ada di sekitarnya. Secara kontekstual mengandung makna bahwa daerah/kabupaten yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sangat berpotensi menjadikan kondisi ekonominya jauh lebih baik dari daerah-daerah yang ada di sekitarnya (*hinterlands*). Dikuatkan oleh Suharyanto et al. (2020) bahwa dari 111 PPKT (Pulau-pulau Kecil Terluar), 61 pulau berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi pulau-pulau yang ada di wilayah perbatasan Indonesia. Potensi ekonomi yang diandalkan bagi 61 pulau-pulau yang terpilih/berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah kemampuan sektor pariwisata yang diharapkan mampu menyedot wisatawan baik domestik maupun dari mancanegara dan mampu membengkakkan devisa yang berguna bagi pembangunan ekonomi khususnya di wilayah perbatasan Indonesia. Begitu juga kabupaten yang mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah pemekaran atau daerah yang ada di sekitarnya, dalam metode skalogram ditunjukkan bahwa daerah terpilih sebagai pusat pertumbuhan memiliki



berbagai fasilitas pelayanan (bidang ekonomi, sosial, pemerintahan, dan infrastruktur) yang jauh lebih baik dari pada daerah-daerah yang ada di sekitarnya (Apriana & Rudiarto, 2020; Hamri et al., 2016).

Dilihat dari celah penelitian berkaitan dengan permasalahan ketimpangan ekonomi yang terjadi pada dua kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, memunculkan dua pertanyaan penting yaitu mengapa sebuah kabupaten induk, secara bersamaan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah/kabupaten yang ada di sekitarnya? dan mengapa daerah/kabupaten yang berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bisa memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih tinggi dari daerah/kabupaten di sekitarnya?.

LANDASAN TEORI

Penentuan pusat pertumbuhan ekonomi dari satu daerah (kabupaten) berfungsi sebagai upaya memacu atau mendorong progresivitas kemajuan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) satu daerah (kabupaten) terhadap daerah-daerah terbelakang/belum berkembang (*hinterland*) yang ada di sekitarnya. Penentuan daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa metode, salah satunya dengan metode skalogram (Putra et al., 2017; Noviyanti et al., 2020). Metode/model skalogram merupakan metode penilaian terhadap fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing kabupten yang mampu memberikan peranannya atau fungsinya terutama dalam bentuk pelayanan ekonomi dan sosial. Beberapa jenis fasilitas yang diukur adalah fasilitas ekonomi (perdagangan), fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan. Kriteria fasilitas yang digunakan biasanya memenuhi kriteria yang bersifat terukur (*measurable*) dan dapat diamati (*observable*) serta bersifat hierarkis (berjenjang secara sistematis) (Apriana & Rudiarto, 2020). Pada umumnya, metode skalogram digunakan untuk menentukan potensi satu daerah (kabupaten) menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi beberapa daerah yang ada di sekitarnya atau menentukan apakah satu daerah mampu/layak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah di belakangnya (*hinterland*). Daerah (kabupaten) yang mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan baik, biasanya diindikasikan oleh tingkat ketimpangan/kesenjangan ekonominya atau paling tidak sama dengan tingkat ketimpangan/kesenjangan daerah (kabupaten) yang ada di sekitarnya (*hinterland*) (Arumpaka, 2018; Suharyanto et al., 2020).

Ketimpangan ekonomi tidak saja disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi pendapatan, tetapi secara kultural terjadi karena perbedaan suku atau rasisme. Beberapa studi di Amerika menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi, secara subjektif terkait dengan perbedaan rasisme yang terjadi antar kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ketimpangan ekonomi tidak hanya terfokus pada aspek distribusi pendapatan saja, akan tetapi menyangkut upaya reduksi ketimpangan yang terkait dengan masalah rasisme-sosial (Kraus et al., 2019). Diperkuat oleh Schmalor & Heine (2021) bahwa ketimpangan ekonomi dapat dikonstruksikan bukan saja sebagai ketimpangan obyektif (diukur melalui pendekatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat) tetapi juga dapat dikonstruksikan sebagai ketimpangan subyektif (diukur melalui pendekatan psikologis, sosio-demografis, dan budaya), di mana antara negara satu dengan negara lain memiliki perbedaan persepsi dan sudut pandang.

Pengukuran ketimpangan ekonomi, secara kuantitatif dapat dilakukan melalui beberapa metode, salahsatunya melalui metode Indeks Gini. Hartmann et al. (2017)



menjelaskan bahwa Indeks Gini dapat menjelaskan kondisi perekonomian suatu negara (diukur dari perkembangan tingkat ketimpangan ekonominya). Semakin tinggi rata-rata dari Indeks Gini suatu negara, maka ketimpangan ekonomi yang terjadi di negara yang bersangkutan semakin tinggi, artinya distribusi pendapatan di negara tersebut semakin tidak merata. Ketimpangan ekonomi (pendapatan) mempunyai hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin timpang kondisi ekonomi (pendapatan) suatu negara, maka akan berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin terhambat. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan dalam kesempatan (dalam konteks hubungan antar generasi menunjukkan adanya kesenjangan antara satu generasi dengan generasi yang lain) (Aiyar & Ebeke, 2019). Arranz (2020) menjelaskan bahwa Gini index merupakan ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan atau tingkat ketimpangan dalam bidang ekonomi (*economic inequality*) dan dalam bidang sosial (*social inequality*).

Secara teoritik, ketimpangan ekonomi (kesenjangan pendapatan) senantiasa terjadi antar daerah baik antar provinsi maupun antar kabupaten bahkan antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten. Pada wilayah kabupaten hasil pemekaran, tidak sedikit tingkat ketimpangan yang terjadi di kabupaten induk justru lebih tinggi dari pada kabupaten-kabupaten hasil pemekaran, dari studi kasus pada 7 provinsi hasil pemekaran, hanya satu yang menunjukkan perkembangan perekonomiannya secara signifikan, sedangkan 6 provinsi yang lain belum menunjukkan perkembangan perekonomiannya secara signifikan. Penelitian Hutajulu et al. (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (salah satu indikator utama kemajuan perekonomian suatu daerah) atau ketimpangan ekonomi ditentukan oleh kekuatan dari dua pengaruh yang bekerja secara berlawanan yaitu pengaruh positif/pengaruh menguntungkan (*spread effect*) yang bergerak melalui efek rembesan atau tetesan ke bawah (*trickle-down effect*) dari atas ke bawah yaitu dari daerah induk ke daerah pemekaran yang berada di daerah sekitarnya. Pada sisi yang bersifat berlawanan adalah terdapatnya pengaruh negatif/pengaruh merugikan (*backwash effect*) yang juga bergerak dari daerah (kabupaten) induk ke daerah (kabupaten) pemekaran (Akinci, 2018; Zhang et al., 2020).

Teori *Circular Cumulative Causation* (C3 theory) menjelaskan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi merupakan mekanisme yang bergerak secara sirkuler dan bersifat kumulatif. Esensi dari teori C3 (*Circular Cumulative Causation theory*), secara substansial menunjukkan bahwa dalam ekonomi berbasis pasar, *backwash effect* lebih besar dari pada *spread effect* dalam proses pembangunan, di mana wilayah yang menyebabkan wilayah maju, maka akan semakin maju; sementara wilayah terbelakang tetap tertinggal. Besar kekuatan *backwash effect* dapat mendorong terjadinya kebocoran ekonomi wilayah akibat tidak adanya proses pengelolaan hasil atau penciptaan nilai tambah di wilayah terbelakang. Pada *spread effect*, pengaruh pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran, sedangkan pada *backwash effect*, pertumbuhan ekonomi dari daerah (kabupaten) induk berdampak negatif dalam bentuk ketimpangan/ketidakmerataan ekonomi di kabupaten pemekaran (Chiang, 2018).

METODOLOGI

Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menghitung/menentukan daerah/kabupaten yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah/kabupaten yang ada di sekitarnya (*hinterland*). 6 daerah/kabupaten berbasis pesisir yang dipilih/ditentukan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terdiri dari 2 zone. Zone I terdiri dari Kabupaten Muko-muko,



Bengkulu Utara, dan Muko-muko; sedangkan Zone II terdiri dari Kabupatrn Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan maksud untuk menentukan secara kualitatif melalui metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dari keterkaitan antara hasil penentuan kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kondisi ketimpangan ekonomi yang terjadi.

Secara umum, data yang digunakan berupa data sekunder dan didukung oleh data primer. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dari sumber data yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan instansi-instansi terkait lainnya. Untuk kedalaman informasi (data) dan memperkuat analisis data, disamping data sekunder juga digunakan data primer, yang dikumpulkan melalui metode wawancara secara mendalam dengan beberapa *stakeholders* terkait. Dari data yang terkumpul, selanjutnya dilakukan dianalisis dengan metode/model Skalogram guna menentukan daerah/kabupaten yang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya (*hinterlands*). Analisis ketimpangan ekonomi dilakukan dengan metode Indeks Gini melalui pemanfaatan hasil perhitungan Gini Indeks yang sudah ada sebelumnya (hasil olahan Badan Pusat Statistik) dan diperkuat oleh hasil perhitungan statistik terkait dan bersifat mendukung analisis (*supporting analysis*).

Secara metodologis, metode skalogram dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan (ekonomi) wilayah berdasarkan fasilitas pelayanan yang dimilikinya, sehingga hirarki pusat-pusat pertumbuhan (ekonomi) dan aktivitas pelayanan suatu wilayah dapat ditentukan (Syahputra et al., 2020). Analisis skalogram memberi kriteria bahwa wilayah yang memiliki fasilitas *terlengkap* merupakan tingkatan (orde) *tertinggi* dan ditetapkan sebagai *pusat pelayanan* (pusat pertumbuhan ekonomi). Perhitungan/penilaian dilakukan dengan teknik/cara yaitu wilayah yang memiliki fasilitas diberi nilai/angka 1, sedangkan wilayah yang tidak memiliki fasilitas diberi nilai/angka 0. Angka-angka tersebut kemudian dijumlahkan secara vertikal dan horizontal. Perhitungan dilanjutkan dengan menguji kelayakan skalogram menggunakan persamaan: $Indeks\ Hirarki\ Skalogram = \sum_k^n (Fik \frac{n}{ak})$; di mana: $\frac{n}{ak}$ = bobot fasilitas penentu. Ketentuan nilai atau tingkat kelayakan pada analisis scalogram adalah nilai COR (*Coefficient of Reproducibility*) = $\frac{1-a}{b \times c}$; dimana a = jumlah kesalahan, b = jumlah kabupaten yang dianalisis, dan c = jumlah jenis fasilitas yang digunakan dalam perhitungan. Kelayakan hirarki Skalogram yang ideal adalah 0.9 – 1 (Apriana & Rudiarto, 2020; Noviyanti et al., 2020; Jamoliddinov & Dsilva, 2019; Ancok & Nurhadi, 2018).

Metode analisis yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat ditentukan melalui Indeks Gini. Penerapan Indeks Gini dilakukan dengan menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita pada setiap daerah (dalam konteks penelitian dilakukan terhadap 6 dari 9 kabupaten berbasis pesisir di wilayah Provinsi Bengkulu) yaitu Kabupaten Muko-muko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Penggunaan metode Indeks Gini ini dimaksudkan untuk menemukan tingkat tingginya ketimpangan ekonomi antara daerah/kabupaten yang telah ditemukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah-daerah/kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya (*hinterlands*) baik pada zone I maupun zone II. Secara grafik, semakin menjauh dengan garis diagonalnya, mengindikasikan daerah/kabupaten tersebut semakin timpang kondisi ekonominya (Hartmann et al., 2017; Chiang, 2018).



HASIL

Hasil perhitungan (dengan metode skalogram) memperlihatkan dua fenomena penemuan dua kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Pada zone I (terdiri tiga daerah/kabupaten pesisir, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Muko-muko, dan Bengkulu Tengah) telah ditemukan/diidentifikasi bahwa Kabupaten Muko-muko terpilih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan nilai skalogram sebesar 27. Nilai/angka ini merupakan nilai terbesar dibanding dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bengkulu Utara (dengan nilai 25) dan Kabupaten Bengkulu Tengah (dengan nilai 11). Pada zone II (terdiri dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, dan Seluma) ditemukan Kabupaten Bengkulu Selatan terpilih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (nilai skalogram sebesar 22). Dua kabupaten yang ada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi (sebagai *hinterlands*) adalah Kabupaten Kaur (dengan nilai 17) dan Kabupaten Seluma (dengan nilai 17). Hasil dari analisis skalogram, secara detail diperlihatkan melalui Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Skalogram Kabupaten-Kabupaten Berbasis Pesisir Tahun 2020

No.	Kabupaten-kabupaten Berbasis Pesisir di Provinsi Bengkulu	Nilai Analisis Skalogram	Kriteria Hierarkis
Kabupaten-kabupaten Pesisir Zone I:			
1	Kabupaten Muko-muko	27	Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Zone I
2	Kabupaten Bengkulu Utara	25	Hinterland Zone I
3	Kabupaten Bengkulu Tengah	11	Hinterland Zone I
Kabupaten-kabupaten Pesisir Zone II:			
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	22	Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Zone II
2	Kabupaten Seluma	17	Hinterland Zone II
3	Kabupaten Kaur	17	Hinterland Zone II

Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (2020)

Fenomena kontradiktif berupa ketidakkonsistenan ketimpangan yang terjadi antara kabupaten induk dengan kabupaten hasil pemekaran dan antara kabupaten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah di sekitarnya (seperti kasus yang terjadi pada Kabupaten Muko-muko di Zone I dan Kabupaten Bengkulu Selatan di Zone II), secara detail hasil analisis dapat ditampilkan pada Tabel 4 berikut.



Tabel 4. Matriks Kontradiksi Ketimpangan Antar Daerah/Kabupaten Berbasis Pesisir (Kabupaten Induk/Pusat Pertumbuhan Ekonomi) di Zone I dan Zone II Tahun 2020

No.	Zone	Kabupaten-kabupaten Berbasis Pesisir di Provinsi Bengkulu	Nilai Skalogram & Posisi/Status Daerah/Kabupaten	Tingkat Ketimpangan Ekonomi (Nilai/ Angka Indeks Gini)	Komparasi Tingkat Ketimpangan Antar Daerah/ Kabupaten
Zone I					
1		Kabupaten Muko-muko	27 (Pusat Pertumbuhan)	0,25	Tingkat Ketimpangan pada Pusat Pertumbuhan (Kab. Muko-muko) lebih rendah daripada Hinterlands (Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Bengkulu Tengah)
2		Kabupaten Bengkulu Utara	25 (Hinterlands)	0,28	
3		Kabupaten Bengkulu Tengah	11 (Hinterlands)	0,26	
Zone II					
1		Kabupaten Bengkulu Selatan	22 (Pusat Pertumbuhan & Induk Pemekaran)	0,31	Tingkat Ketimpangan pada Pusat Pertumbuhan (Kab. Bengkulu Selatan) lebih tinggi daripada Hinterland Kab. Seluma dan lebih rendah



				daripada Hinterland (Kab. Kaur)
2	Kabupaten Seluma	17 (Hinterlands)	0,29	
3	Kabupaten Kaur	17 (Hinterlands)	0,32	

Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (2020)

PEMBAHASAN

Hasil perhitungan dengan metode skalogram (ditunjukkan oleh Tabel 3), mengindikasikan dua fenomena bersifat kontradiktif. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan nilai skalogram antara pusat pertumbuhan di zone I dan di zone II. Pada zone I diperlihatkan terjadinya fenomena keganjilan/anomali di mana semestinya Kabupaten Muko-muko yang bukan berstatus sebagai kabupaten induk dari hasil pemekaran, tetapi dari hasil perhitungan skalogram ditunjukkan bahwa Kabupaten Muko-muko justru terpilih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (dengan nilai 27). Pada zone II, kabupaten yang teridentifikasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi jatuh pada Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil penentuan pusat pertumbuhan ini dinilai cukup wajar. Kewajaran ini didasarkan pada kondisi di mana sebagai kabupaten induk pemekaran, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki modal kemajuan ekonomi lebih awal lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yang ada di sekitarnya (*hinterlands*). Secara normatif, kesesuaian penemuam ini dikuatkan oleh hasil studi yang menunjukkan bahwa konsep rembesan ke bawah (*trickle-down effect*) menjadi salahsatu kunci keberhasilan dalam memajukan kondisi perekonomian daerah-daerah hinterlands secara bersama-sama (Brueckner & Lederman, 2018).

Dikaitkan dengan fenomena ketimpangan ekonomi (ketimpangan pendapatan), hasil studi menunjukan adanya fenomena kontradiktif/anomali dan tidak konsisten. Secara normatif, sebuah kabupaten yang berstatus sebagai induk pemekaran (kondisi ekonomi lebih maju) dan secara bersamaan berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, semestinya tingkat ketimpangan ekonominya lebih rendah daripada daerah/kabupaten hasil pemekaran lainnya (*hinterlands*) (Nugraha et al., 2020; Sanjaya et al., 2019). Berdasarkan Tabel 2, tampak fenomena ketimpangan ekonomi terjadi secara tidak merata pada 6 kabupaten yang berbasis pesisir. Dari kedua kabupaten yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (Kabupaten Muko-muko dan Kabupaten Bengkulu Selatan), ternyata hanya ada satu kabupaten yang tingkat ketimpangan ekonominya lebih rendah dari kabupaten induk pemekarannya yaitu Kabupaten Muko-muko (terjadi pada kelompok Zone I). Dalam konteks ini (di tahun 2020), tingkat ketimpangan ekonomi di Kabupaten Muko-muko (Indeks Gini = 0,25) lebih rendah dari Kabupaten Bengkulu Utara (yang pada saat itu berstatus sebagai kabupaten induk, dengan Indeks Gini = 0,28) dan Kabupaten Bengkulu Tengah (Indeks Gini = 0,26). Kondisi berbeda terjadi pada Zone II, di mana tingkat ketimpangan ekonomi di kabupaten Bengkulu Selatan (secara bersama-sama berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagai kabupten induk pemekaran) lebih tinggi dari Kabupaten Kaur dan lebih rendah dari Kabupaten Seluma. Indeks Gini di Kabupaten Bengkulu Selatan = 0,31 lebih rendah dari Indeks Gini Kabupaten Kaur = 0,32 dan lebih tinggi daripada Kabupaten Seluma = 0,29.

Matriks fenomena kontradiktif berupa ketidakkonsistenan ketimpangan yang terjadi antara kabupaten induk dengan kabupaten hasil pemekarannya, antara kabupaten sebagai



pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah di sekitarnya (seperti kasus yang terjadi pada Kabupaten Muko-muko di Zone I dan Kabupaten Bengkulu Selatan di Zone II), secara detail diperlihatkan oleh Tabel 4. Secara kontekstual, analisis interaksinya dapat dijelaskan melalui dua sebab utamanya sebagai berikut:

- (1) Pada Zone I, Kabupaten Muko-muko yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang mengalahkan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pesaingnya adalah cukup beralasan. Ditunjang oleh infrastruktur bandara perintis yang berada di wilayah ibukota kabupaten, menjadikan Kabupaten Muko-muko terpilih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dengan tingkat ketimpangan lebih rendah dibanding dua kabupaten di sekitarnya termasuk di dalamnya Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kabupaten induknya.
- (2) Ibu kota Kabupaten Muko-muko terletak di pinggiran wilayah pesisir, sedangkan ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah terletak pada radius yang relatif lebih jauh dari wilayah pesisir. Kondisi ini menyebabkan mobilitas dan akses perdagangan antar kabupaten dan antar provinsi di Kabupaten Muko-muko lebih cepat dan lebih mudah dibanding kedua kabupaten lainnya (Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah). Sehingga membuat tingkat ketimpangan ekonomi di Kabupaten Muko-muko lebih rendah dari Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (3) Kondisi ketimpangan yang terjadi pada zone I ini, secara teoritik dapat dijelaskan bahwa pada kabupaten ini (Kabupaten Muko-muko), efek rembesan (*trickle-down effect*) sudah berfungsi secara efektif di ketiga wilayah yaitu Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Tengah; kendati terjadi perbedaan yang tidak terlalu signifikan (Syamsir & Rahman, 2018).

Berbeda dengan fenomena ketimpangan yang terjadi pada Zone I, sebab-sebab terjadinya perbedaan/kontradiksi tingkat ketimpangan ekonomi pada Zone II yaitu antara kabupaten induk (kaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi) dengan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya (*hinterlands*), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Kontradiksi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan (secara bersamaan berstatus sebagai kabupaten induk pemekaran dan pusat pertumbuhan ekonomi) terlihat pada fenomena di mana tingkat ketimpangan di Kabupaten Bengkulu Selatan (Indeks Gini = 31) lebih rendah daripada di Kabupaten Kaur (Indeks Gini = 32), namun lebih tinggi dari Kabupaten Seluma (Indeks Gini = 29). Kondisi ini disebabkan oleh tingkat ketimpangan yang terjadi sebelumnya (sebelum Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi 3 kabupaten, dengan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induknya).
- (2) Tingkat ketimpangan yang kontradiktif di Zone II ini juga diakibatkan oleh heterogenitas populasi dan tingkat kepemilikan asset perkebunan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (sebagai kabupaten induk dan pusat pertumbuhan ekonomi) ini jauh lebih tinggi dibanding dua kabupaten hasil pemekaran (Kabupaten Kaur dan Seluma).
- (3) Secara teoritik, fenomena anomali ketimpangan ini menunjukkan tidak berfungsinya efek rembesan (*trickle-down effect*) secara efektif khususnya di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan; namun sebaliknya terjadi efek rembesan (*trickle-down effect*) yang cukup efektif di Kabupaten Seluma. Dalam kasus ini, orang-orang bermodal melakukan migrasi ke arah daerah/kabupaten/kota yang lebih menjanjikan guna melakukan investasi yang lebih menguntungkan. Kondisi inilah yang menyebabkan ketimpangan di daerah induk (kabupaten Bengkulu Selatan) semakin tinggi dan bahkan lebih tinggi dari daerah/kabupaten yang ada di sekitarnya.



(hinterlands) yakni Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (Yuliadi & Raharja, 2020).

Kebaruan Penelitian (*Novelties*)

Terdapat dua kebaruan (*novelties*) akibat perbedaan antara temuan penelitian dengan temuan penelitian sebelumnya, yaitu:

- (1) Kebaruan (*novelty*) I mengindikasikan bahwa tidak semua daerah/kabupaten yang menjadi induk pemekaran, secara otomatis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah/kabupaten lain yang ada di sekitarnya. Simpulan ini didasarkan pada pertentangan antara kondisi empiris yang terjadi dengan beberapa hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa secara umum daerah/kabupaten yang berstatus sebagai kabupaten induk, secara umum menjadi daerah/kabupaten yang berperan sebagai pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena faktor kemampuan daerah/kabupaten induk mendesiminasikan pengaruh rembesan/tetes (*trickle-down effect*) terhadap daerah/kabupaten yang menjadi daerah/kabupaten hasil pemekaran secara cepat (Akinci, 2018; Zhang et al., 2020).
- (2) Kebaruan (*novelty*) II diperlihatkan melalui pertentangan antara penemuan sebuah daerah/kabupaten yang mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, padahal awalnya bukan sebagai daerah/kabupaten induk dan mempunyai nilai/angka tingkat ketimpangan ekonomi (berbasis Indeks Gini) lebih rendah daripada daerah/kabupaten yang ada di sekitarnya (*hinterlands*). Kebaruan ini mengindikasikan adanya kontribusi teoritik yakni sebuah pemikiran bahwa dengan memacu kemampuan atau potensi daerah induk pemekaran secara optimal dan konsisten (seperti peningkatan teknologi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, suntikan permodalan, dan lain-lain), maka efek rembesan (*trickle-down effect*) yang bersifat positif ini akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah/kabupaten hasil pemekaran secara cepat dan distribusi pendapatan secara lebih merata (teori pertumbuhan dari Solow) (Osiobe, 2019).

KESIMPULAN

- (1) Ditemukan dua kabupaten yang mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah/kabupaten sekitarnya (*hinterlands*), yaitu (1) Kabupaten Muko-muko (berada di zona I), dengan dua daerah/kabupaten di sekitarnya yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah; dan (2) Kabupaten Bengkulu Selatan (berada di zona II), dengan dua daerah/kabupaten di sekitarnya yaitu Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.
- (2) Ketidakmampuan dalam mengimplementasikan pengaruh rembesan (*trickle-down effect*) secara efektif dari sebuah kabupaten induk pemekaran dan/atau yang secara bersamaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, dapat menjadi pemicu utama terjadinya ketimpangan ekonomi yang lebih besar ketimbang daerah/kabupaten hasil pemekaran yang ada di sekitarnya (*hinterlands*). Empat faktor penting yang bisa menjadi pemicu ketidakefektifan pengaruh rembesan (*trickle-down effect*) adalah kualitas sumberdaya manusia, akses permodalan, investasi, dan faktor sosial (motivasi, Kerjasama, dan kebersamaan).



DAFTAR PUSTAKA

- Aiyar, S., & Ebeke, C. (2019). Inequality of Opportunity, Inequality of Income and Economic Growth. *IMF Working Papers*, 19(34). <https://doi.org/10.5089/9781484396988.001>
- Akinci, M. (2018). Inequality and economic growth: Trickle-down effect revisited. *Development Policy Review*, 36. <https://doi.org/10.1111/dpr.12214>
- Ancok, Z. W., & Nurhadi, N. (2018). Kajian pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Klaten. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 16(1). <https://doi.org/10.21831/gm.v16i1.20976>
- Apriana, M., & Rudiarto, I. (2020). Penentuan pusat pelayanan perkotaan di kota Tanjungpinang. *Tunas Geografi*, 9(1). <https://doi.org/10.24114/tgeo.v9i1.17217>
- Arranz, U. C. (2020). The gini index: A proposal for revision. *Recta*, 21(1). <https://doi.org/10.24309/recta.2020.21.1.01>
- Arumpaka Priangga, A. (2018). Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karanganyar 2009-2013. *Economics Development Analysis Journal*, 5(3). <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i3.22151>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Kemiskinan dan Ketimpangan. *Badan Pusat Statistik - Kemiskinan Dan Ketimpangan*, 05. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2021). Provinsi Bengkulu Dalam Angka. *Badan Pusat Statistik. Bengkulu*
- Brueckner, M., & Lederman, D. (2018). Inequality and economic growth: the role of initial income. *Journal of Economic Growth*, 23(3). <https://doi.org/10.1007/s10887-018-9156-4>
- Chiang, S. hen. (2018). Assessing the merits of the urban-led policy in China: Spread or backwash effect? *Sustainability (Switzerland)*, 10(2). <https://doi.org/10.3390/su10020451>
- Fitrawaty, F. (2020). The Analysis of Inequality on Economic Growth in Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal*, 1(3). <https://doi.org/10.47175/rissj.v1i3.103>
- Hamri, E., Putri, E. I. K., Siregar, H. J., & Bratakusumah, D. S. (2016). Kebijakan pemekaran wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1). <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.412>
- Hartmann, D., Guevara, M. R., Jara-Figueroa, C., Aristarán, M., & Hidalgo, C. A. (2017). Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality. *World Development*, 93. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.020>
- Huang, X., Song, Y., & Hu, X. (2021). Deploying spatial data for coastal community resilience: a review from the managerial perspective. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 18, Issue 2). <https://doi.org/10.3390/ijerph18020830>
- Hutajulu, D. M., Panjawa, J. L., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. (2020). Determinan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan wilayah induk dan pemekaran di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2). <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3293>
- Jamoliddinov, F., & Dsilva, J. (2019). Investigating the Central Place Theory: A Case Study on Uzbekistan. *International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.31098/ijmesh.v2i1.9>
- Khrismaningrum, N. M. P. (2020). Analisis ketimpangan ekonomi dan potensi



- pertumbuhan ekonomi daerah wisata laut dan daerah wisata gunung di provinsi Bali. *Journal of Economics Development Issues*, 3(01). <https://doi.org/10.33005/jedi.v3i01.38>
- Kraus, M. W., Onyeador, I. N., Daumeyer, N. M., Rucker, J. M., & Richeson, J. A. (2019). The Misperception of Racial Economic Inequality. *Perspectives on Psychological Science*, 14(6). <https://doi.org/10.1177/1745691619863049>
- Kurniawan, R., & Huda, S. (2020). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(2). <https://doi.org/10.33005/jdep.v3i2.115>
- Noviyanti, D., Emma Pravitasari, A., & Sahara, S. (2020). Analisis Perkembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat Untuk Arah Pengembangan Berbasis Wilayah Pengembangan. *JURNAL GEOGRAFI*, 12(01). <https://doi.org/10.24114/jg.v12i01.14799>
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Situmorang, M. E., & Nasution, A. (2020). The role of infrastructure in economic growth and income inequality in Indonesia. *Economics and Sociology*, 13(1). <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-1/7>
- Osiobe, E. U. (2019). A Literature Review of Human Capital and Economic Growth. *Business and Economic Research*, 9(4). <https://doi.org/10.5296/ber.v9i4.15624>
- Putra, N. A., Badjuri, B., & Anifatul, H. (2017). Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Di Eks. Karesidenan Besuki. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4603>
- Sanjaya, L. R., Soetarto, E., & Pravitasari, A. E. (2019). Ketimpangan pembangunan wilayah di provinsi Kalimantan Tengah (kajian pada kabupaten Kotawaringin Timur dan pemekarannya). *Tataloka*, 21(2). <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.2.253-266>
- Schmalor, A., & Heine, S. J. (2021). The Construct of Subjective Economic Inequality. *Social Psychological and Personality Science*. <https://doi.org/10.1177/1948550621996867>
- Simangunsong, D., & Kuang-Hui, C. (2018). Inequality and Economic Growth in Indonesia in The 2000's. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(2). <https://doi.org/10.15408/sjie.v7i2.6177>
- Suharyanto, S., Zulham, A., Sidqi, M., Sudianto, A., Widiyanto, A., Suraji, S., & P, D. E. (2020). Pulau-Pulau Kecil Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Review Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(1). <https://doi.org/10.15578/marina.v6i1.8934>
- Syahputra, A., Yonariza, Y., & Hasnah, H. (2020). Analisis Penentuan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Komoditi Basis Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. *JOSETA: Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 2(2). <https://doi.org/10.25077/joseta.v2i2.231>
- Syamsir, A., & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/ecc.v5i1.5235>
- Yuliadi, I., & Raharja, S. S. (2020). Migration and Economic Inequality in Indonesia: Longitudinal Data Analysis. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.541>
- Zhang, X., Tan, Y., Hu, Z., Wang, C., & Wan, G. (2020). The Trickle-down Effect of Fintech Development: From the Perspective of Urbanization. *China and World Economy*, 28(1). <https://doi.org/10.1111/cwe.12310>

